HASIL SIDAK LAPAS KELAS II B BATAM, INI KATA KETUA DPRD BATAM DAN OMBUDSMAN KEPRI

Senin, 13 Februari 2023 - Reihana Ferdian

BATAM I KEJORANEWS.COM : Terdapatnya temuan-temuan hasil dari peninjuan langsung, DPRD Batam dan Ombudsman Kepri memberikan saran dan perbaikan bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Batam, Sagulung - Batam.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto SH,MH menyampaikan apresiasi, dan terdapatnya Lapas diluar kapasitas harus dicarikan solusi, artinya mereka kan masyarakat kita juga. inikan tempat pembinaan, kalau over kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) nya terabaikan.

"Ini harus disikapi pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Ham, langkah apa untuk mensikapi masalah ini. Harus membangun bnagunan baru, atau pemindahan tahanan ke Rutan lainnya," katanya.

"Terkait Mesin X-ray rusak, pungutan liar, hingga peredaran Narkoba, Pemerintah harus meningkatkan lebih, dari pencegahan, kalau tidak di cegah ini akan bertambah banyak," terangnya, di kantor DPRD Batam, Batam Centre - Batam, (10/2).

Sebelumnya, dari hasil Inspeksi mendadak (Sidak), (30/1/23), di Lapas Kelas II B Batam, Sagulung - Batam. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Lagat Siadari menyampaikan bahwa ditemukannya mesin X-ray rusak, dan belum diperbaiki, dimana alat ini sangat penting dalam memeriksa setiap barang-barang yang dibawa oleh tamu/pengunjung, sehingga tidak membawa barang - barang yang dilarang.

"Penjara ini sudah memenuhi kapasitas, dimana maksimal 450 sekian kini sudah terisi mencapai 1000 lebih, tentu ini tidak sehat, dan kita tentu juga menemukan mayoritas narapidana/warga binaan disana itu adalah kasus Narkoba sebanyak 896 orang sebagai bandar penegdar dan pemakai," terangnya.

Hasil peninjauan di Lapas, diantaranya di Klinik, terdapat 1 dokter umum, 3 perawat, 1 petugas administrasi. Di dapur, terdapat 21 petugas dari warga binaan (masak pagi, siang, dan sore). Aktifitas warga binaan, mulai dari Pekerjaan tangan pembuatan roti, tempe, barang barang sovenir, hingga Pembinaan spritual, dan terdapat masjid, gereja, vihara.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga melakukan sosialisasi mengenai hak hak warga binaan. Dan juga memberikan saran agar pihak Lapas memperbaiki mesin X-ray, memastikan tidak ada pungutan liar atau imbalan dalam layanan, kunjungan tahanan, cuti bersyarat, bebas bersyarat, uang kamar dan lainnya.

"Kita dengar ada terdapat kutipan untuk warga binaan tersebut. Kami berharap tidak ada pungutan demikian," terangnya.

Lanjutnya, kelebihan kapasitas agar Kanwil dan Pusat, membangun ruang tahanan baru, atau memindahkan tahanan kelapas lain, khusunya narapidana kasus Narkoba.

"Kalapas tidak membiarkan atau memastikan di Lapas tidak ada peredaran Narkoba, Kita tau peluang untuk mendapat

Narkoba sangat besar dengan adanya mereka disana (Narapidana Narkoba). Pengendalian Narkoba bukannya dari luar tapi dari dalam. Tidak ada narkoba yang digunakan dan diedarkan di Lapas ini. Ini kejahatan yang luar biasa," jelasnya.

"Klinik berfungsi 24 Jam tidak on call. sehingga warga binaan bisa berobat. untuk itu diatur sedemikian rupa. Prakerja dan karya warga binaan dikembangkan terus. pengusaha Pemda, untuk dapat membantu memfasilitasi pelatihan atau modal sehingga bermanfaat besar, dan ketika keluar nanti mempunyai keterampilan yang dapat digunakan untuk sebagai mata pencarina/nafkanya," tutupnya.